

# PENGUATAN KELEMBAGAAN PEKEBUN KELAPA SAWIT DALAM UPAYA SERTIFIKASI ISPO DI DESA KOTO TIBUN KABUPATEN KAMPAR

Yulia Andriani<sup>1\*</sup>, Deby Kurnia<sup>2</sup>,  
Jum'atri Yusri<sup>3</sup>, Fajar Restuhadi<sup>4</sup>,  
Rosnita<sup>5</sup>, Roza Yulida<sup>6</sup>, Evy  
Maharani<sup>7</sup>, Didi Muwardi<sup>8</sup>, Yeni  
Kusumawaty<sup>9</sup>, Fanny Septya<sup>10</sup>,  
Elisya Anggraini<sup>11</sup>, Mimi  
Nurfitasari<sup>12</sup>, M. Rasyid Hamidi<sup>13</sup>

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) Program Studi  
Agribisnis, Fakultas Pertanian,  
Universitas Riau

<sup>11)</sup> Program Studi Agribisnis, Fakultas  
Pertanian, Universitas Riau

<sup>12), 13)</sup> Program Studi Magister  
Agribisnis, Fakultas Pertanian,  
Universitas Riau

## Article history

Received : 11 November 2024

Revised : 17 November 2024

Accepted : 22 Desember 2024

## \*Corresponding author

Yulia Andriani

Email :

yulia.andriani@lecturer.unri.ac.id

## Abstrak

*Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai dan mendukung perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pembinaan tentang penerapan ISPO khususnya penguatan kelembagaan pekebun kepada mitra pengabdian yaitu pekebun kelapa sawit swadaya di Desa Koto Tibun. Kegiatan pengabdian dilaksanakan menggunakan metode ceramah dan diskusi tim pengabdian Unri dan juga dari Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar. Pendampingan secara berkala terus dilakukan dalam upaya kelanjutan dari materi yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan. Hasil dari kegiatan pengabdian dilakukan pengukuran peningkatan pemahaman pekebun. Dari hasil posttest 62.5% pekebun meningkat pengetahuannya tentang kelembagaan pendukung, pekebun memahami bahwa dengan adanya kelembagaan, khususnya kelompok tani maka pekebun akan bisa mendapatkan informasi tentang budidaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan, meskipun masih ada pekebun menganggap bahwa tujuan kelembagaan adalah untuk mendapatkan bantuan finansial dari pemerintah. Kesimpulan dari kegiatan ini, berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang kelembagaan petani kelapa sawit, tujuan pembentukan kelompok tani, pengaruh kelompok tani terhadap hasil panen kelapa sawit, dan pentingnya partisipasi dalam kelompok tani. Dari kegiatan pengabdian ini selanjutnya diinisiasi pembentukan kelompok tani dalam persiapan sertifikasi ISPO.

Kata Kunci: Dukungan, ISPO; Kelembagaan; Pekebun; Sertifikasi

## Abstract

*Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* is one of the government's efforts to achieve and support sustainable and responsible oil palm plantations and management. The purpose of this service activity is to guide the implementation of ISPO, especially strengthening the institution of smallholders to service partners, namely independent oil palm planters in Koto Tibun Village. Service activities were carried out using the lecture and discussion method of the Unri service team and also from the Kampar Regency Plantation, Livestock, and Animal Health Office. Periodic assistance continues to be provided to continue the material obtained from the training. The results of the service activities were measured to increase the understanding of planters. From the results of the post-test, 62.5% of smallholders increased their knowledge of supporting institutions, smallholders understand that with the existence of institutions, especially farmer groups, smallholders will be able to get information about cultivation which can ultimately increase income, although there are still smallholders who consider that the institutional purpose is to get financial assistance from the government. The conclusion of this activity succeeded in increasing participants' understanding of the institution of oil palm farmers, the purpose of forming farmer groups, the influence of farmer groups on oil palm yields, and the importance of participation in farmer groups.

Keywords: Support; ISPO; Institutions; Farmers; Certification

Copyright © 2025 by Author, Published by Dharmawangsa University  
Community Service Institution

## PENDAHULUAN

Industri perkebunan kelapa sawit memiliki peran signifikan dalam memajukan perekonomian Indonesia. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan dengan nilai ekonomi tinggi, sekaligus

menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Kelapa sawit mempunyai banyak keunggulan dikarenakan dapat menghasilkan minyak sawit yang paling produktif dan efisien dibandingkan dengan minyak nabati yang lainnya. Harganya yang terjangkau dan proses produksinya sederhana menjadikan minyak sawit sebagai minyak yang paling sering digunakan dan diproduksi di dunia. Minyak ini dimanfaatkan dalam berbagai jenis makanan, produk kosmetik, kebersihan, serta sebagai bahan bakar nabati seperti biofuel dan biodiesel. Luas areal perkebunan kelapa sawit selalu meningkat setiap tahun, pada tahun 2024 tercatat areal perkebunan rakyat seluas 6,4 juta hektar (Ditjenbun, 2024). Provinsi Riau menempati posisi teratas dalam daftar lima provinsi penghasil kelapa sawit terbesar pada tahun 2022, yang kemudian diikuti oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia adalah Provinsi Riau yang memiliki 3,5 juta hektar dengan produksi 8,7 Ton (Ditjenbun, 2024). Pertumbuhan dan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia berlangsung dengan pesat, khususnya di Provinsi Riau. Sekitar setengah dari total keseluruhan luas perkebunan kelapa sawit di Riau merupakan perkebunan rakyat yang diorganisir oleh masyarakat dengan pola plasma ataupun pola swadaya. Tercatat, lebih dari 61% areal perkebunan kelapa sawit dikuasai oleh perkebunan rakyat, selanjutnya 36% perkebunan besar swasta dan sisanya dikuasa oleh perkebunan besar negara (BPS Provinsi Riau, 2024).

Keunggulan minyak sawit dalam berbagai aspek telah mendorong peningkatan permintaan minyak sawit yang selaras dengan perkembangan teknologi pengolahannya. Walaupun industri ini memberikan manfaat ekonomi yang besar, pengelolaannya di Indonesia sering kali dianggap tidak berkelanjutan dan merugikan lingkungan (Rodhiah, 2018). Pada satu sisi, industri kelapa sawit memiliki kontribusi penting dalam memperkuat perekonomian nasional serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun, di sisi lain, praktik operasionalnya masih menimbulkan polemik (Berenschot et al., 2022). Hal ini dikarenakan pelaku industri ini belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang melibatkan aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*). Salah satu dampak lingkungan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit adalah penggundulan hutan, polusi, dan kebakaran hutan yang makin parah (Purnomo et al., 2017). Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk mengimplementasikan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan melalui mekanisme *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) (Rahutomo et al., 2022).

Demi mewujudkan praktik perkebunan kelapa sawit yang tidak merugikan lingkungan serta menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO) dengan kualitas tinggi tanpa praktik deforestasi atau pembakaran hutan dalam proses ekstensifikasi, sertifikasi menjadi keharusan bagi setiap perkebunan kelapa sawit. Sertifikasi ISPO memberikan kontribusi penting dalam mendukung petani swadaya untuk menerapkan *Good Agricultural Practice* (GAP), sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Selain itu, sertifikasi ISPO juga mendukung peningkatan kesejahteraan petani swadaya, antara lain dengan meningkatkan produktivitas melalui GAP serta mempermudah akses pasar. Penguatan kelembagaan petani kelapa sawit menjadi elemen kunci dalam upaya memperoleh sertifikasi ISPO maupun *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Sertifikasi ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi mencerminkan komitmen terhadap praktik pertanian yang berkelanjutan, etis, dan peduli lingkungan. Untuk memenuhi standar yang ditetapkan ISPO dan RSPO, diperlukan pemahaman yang menyeluruh serta kemampuan manajerial yang baik dari para petani kelapa sawit dalam menerapkan kebijakan yang relevan. Penguatan sistem ISPO memerlukan tiga aspek utama. Pertama, dari sisi substansi hukum, ISPO perlu ditingkatkan statusnya dari peraturan menteri pertanian menjadi peraturan presiden, sehingga memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Kedua, dari sisi aparatur hukum, sistem kelembagaan sertifikasi ISPO perlu diperbaiki dan diperkuat. Kedua, dari perspektif budaya hukum, dibutuhkan pemahaman yang seragam mengenai definisi serta prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit di Indonesia (Fahamsyah & Pramudya, 2017).

Sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) merupakan kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia untuk memastikan produksi kelapa sawit dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global serta meredam kritik negatif terhadap pembangunan sektor kelapa sawit di Indonesia. ISPO untuk perkebunan skala besar melibatkan 7 prinsip, 41 kriteria, dan 126 indikator, sementara untuk perkebunan kelapa sawit

swadaya hanya mencakup 4 prinsip, 7 kriteria, dan 48 indikator. Prinsip-prinsip yang diterapkan bagi pekebun swadaya meliputi legalitas usaha, pengorganisasian dan pengelolaan usaha kebun, pengelolaan serta peninjauan lingkungan, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Pada Maret 2020, Pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11/OT.140/3/2015, yang mengatur sertifikasi ISPO baik secara wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*). Perpres ini menetapkan bahwa seluruh pelaku usaha yang bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit harus untuk memiliki sertifikasi ISPO. Meskipun kewajiban ini telah berlaku sejak 2020, realisasi sertifikasi di perkebunan rakyat masih rendah, hanya 14 sertifikat ISPO yang diterbitkan untuk perkebunan rakyat, yang setara dengan 0,21% dari total 6,08 juta hektar luas perkebunan rakyat (Hadi et al., 2023).

Masih rendahnya jumlah petani yang mendapatkan sertifikasi ini karena pekebun kesulitan untuk memenuhi standar yang ditetapkan (Dharmawan et al., 2019; Hutabarat et al., 2018). Salah satu standar yang harus dipenuhi pekebun adalah adanya organisasi kelembagaan pekebun (prinsip 2, kriteria 1 ISPO). Pada kriteria tersebut dikatakan bahwa pekebun harus memiliki kelembagaan dalam bentuk kelompok tani atau koperasi. Berdasarkan wawancara dengan pekebun, penyuluh dan kepala Desa Koto Tibun, diketahui bahwa pekebun kelapa sawit swadaya di sana juga masih terbatas kemampuannya dalam memenuhi prinsip ISPO tersebut. Untuk kelembagaan bahkan tidak adanya kelembagaan khusus pekebun, meskipun hanya kelompok tani. Padahal kelembagaan merupakan suatu keharusan dalam persiapan sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya (Hutabarat, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bahwa perlu segera dilakukan penguatan kelembagaan secara komprehensif dan intensif kepada pekebun kelapa sawit di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Dipilih penguatan kelembagaan sebagai langkah awal adalah karena untuk pemenuhan standar ISPO lainnya, petani harus bergabung dalam kelembagaan. Hal ini didukung dari hasil kajian pada 32 artikel terkait sertifikasi ISPO yang mengatakan bahwa salah satu kendala sulitnya pekebun mendapatkan sertifikasi ISPO adalah karena rendahnya kelembagaan petani rakyat (Liana et al., 2023). Kegiatan pengabdian ini adalah kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya yang telah mensosialisasikan ISPO, tujuan, manfaat serta prinsipnya. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memperkuat kelembagaan petani kelapa sawit swadaya dalam rangka mendukung proses sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan RSPO secara menyeluruh di Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan ISPO. Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi perguruan tinggi dan masyarakat sasaran. Manfaat program ini bagi perguruan tinggi adalah sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sementara itu, untuk masyarakat sasaran, kegiatan ini membantu memperkuat kelembagaan petani kelapa sawit swadaya sehingga mereka dapat memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO dan RSPO di masa mendatang.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Jurusan Agribisnis Universitas Riau ini dirancang sebagai upaya penguatan kelembagaan yang merupakan kriteria dari prinsip kedua dalam ISPO bagi pekebun swadaya. Sasaran kegiatan pada kegiatan pengabdian ini adalah pekebun kelapa sawit swadaya yang berjumlah 30 orang, pengurus desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Koto Tibun Kabupaten Kampar pada Bulan Juli hingga November 2024. Kegiatan dilaksanakan dengan metode penyuluhan dan pelatihan serta pendampingan teknis penguatan kapasitas kelembagaan pekebun dengan menginisiasi pembentukan kelompok tani. Kegiatan dimulai dari tahap persiapan yaitu analisis situasi dengan mengidentifikasi pengetahuan pekebun, selanjutnya mengurus perizinan dari pihak desa dan instansi terkait yaitu Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar. Setelah mendapatkan izin, dilaksanakan

koordinasi dengan perwakilan pengurus desa untuk mempersiapkan keperluan untuk kegiatan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan pada tanggal 29 Agustus 2024.

Pada sesi penyuluhan, tim pengabdian memberikan informasi tentang peran kelembagaan, apa saja komponen kelembagaan, kelompok tani sebagai salah satu contoh kelembagaan petani, fungsi kelompok tani hingga dinamika dalam kelompok tani. Penguatan kapasitas kelembagaan pekebun dilakukan dengan menginisiasi pembentukan kelompok tani sebagai tempat bagi pekebun untuk belajar bersama, pelatihan dan dukungan lainnya. Tahap pendampingan teknis dilaksanakan dengan melakukan pendampingan langsung di lapangan untuk membantu pekebun dalam membentuk dan mengelola kelembagaan. Pendampingan juga dilakukan melalui WhatsApp untuk memberikan konsultasi dan bimbingan berkelanjutan. Dilakukan Pembagian tugas dan peran dari tim pengabdian, sebagai berikut :

1. Tim pengabdian kepada Masyarakat Jurusan Agribisnis Universitas Riau melakukan sosialisasi tentang pentingnya ISPO, kriteria, prinsip dan pentingnya kelembagaan dalam proses sertifikasi khususnya. Selanjutnya tim melakukan pendampingan teknis baik secara langsung ke desa maupun melalui Whatsapp dengan petani dan pengurus Desa.
2. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar memberikan penjelasan tentang praktek baik adanya kelembagaan petani.
3. Pengurus desa membantu melakukan koordinasi bersama tim pengabdian dan pekebun.

Setelah pelaksanaan penyuluhan dan rangkaian kegiatan pengabdian, dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan dilakukan melalui evaluasi kegiatan pengabdian. Pengukuran keberhasilan kegiatan dilakukan secara deskriptif berdasarkan jumlah pekebun yang mengikuti penyuluhan, pelatihan hingga pendampingan teknis. Selanjutnya secara kualitatif dilakukan dengan mengukur tingkat pemahaman pekebun tentang prinsip dan kriteria ISPO serta pemahaman tentang efektivitas kelembagaan pekebun dalam mengelola kebun dan memenuhi standar ISPO. Pengukuran ketercapaian tujuan dilakukan dengan survei dan wawancara serta melakukan pre dan post test kepada pekebun.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### ***Penguatan Kelembagaan Pekebun Kelapa Sawit Swadaya***

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, melalui penerapan sertifikasi ISPO. Sertifikasi ISPO merupakan skema pengakuan keberlanjutan yang diberikan kepada perkebunan kelapa sawit yang memiliki prinsip dan kriteria keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Namun, banyak pekebun skala kecil di Indonesia, termasuk di Desa Koto Tibun Kabupaten Kampar, yang belum tersertifikasi ISPO. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan tentang ISPO, kurangnya pendampingan teknis, dan kelemahan kelembagaan pekebun.

Sertifikasi ISPO bagi perkebunan skala besar mencakup 7 prinsip, 41 kriteria dan 126 indikator, yang dirancang guna mendorong perkembangan industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi aspek teknis perkebunan, kepatuhan terhadap legalitas usaha, prosedur pembukaan lahan, tata kelola perluasan perkebunan, serta pengembangan komunitas. Ketujuh prinsip tersebut terdiri dari:

- Prinsip 1. Sistem Perijinan dan Manajemen Perkebunan.
- Prinsip 2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit.
- Prinsip 3. Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan.
- Prinsip 4. Tanggung Jawab terhadap Pekerja.
- Prinsip 5. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas.
- Prinsip 6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.
- Prinsip 7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit besar, baik dari sektor swasta (PBS) maupun sektor negara (PBN), diharuskan mengikuti tujuh prinsip utama. Namun, untuk perkebunan kelapa sawit swadaya hanya diterapkan

4 prinsip, yang terdiri dari 7 kriteria dan 48 indikator. Prinsip dan kriteria ISPO bagi perkebunan kelapa sawit pekebun swadaya (ISPO, 2015):

Prinsip 1. Legalitas Pekebun Swadaya.

Prinsip 2. Organisasi Pekebun dan Pengelolaan Kebun Swadaya.

Prinsip 3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

Prinsip 4. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang fokus pada capaian prinsip 2 ISPO yaitu Organisasi pekebun dan pengelolaan kebun swadaya. Kegiatan pertama dilakukan pada kegiatan pengabdian ini adalah dengan penyuluhan. Pada penyuluhan ini ditekankan pentingnya organisasi pekebun (dalam hal ini adalah kelompok tani) dalam mengelola kebun secara kolektif, mengakses informasi dan pelatihan, serta memperoleh dukungan dari pemerintah dan pihak terkait lainnya. Materi pada sesi ini adalah:

1. Mensosialisasikan pentingnya organisasi pekebun dalam mengelola kebun secara kolektif, mengakses informasi dan pelatihan, serta memperoleh dukungan dari pemerintah dan pihak terkait lainnya. Organisasi pekebun dalam hal ini adalah kelembagaan pekebun berperan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan produktivitas pertanian, melindungi kepentingan petani dalam kegiatan pertanian. Kelembagaan pekebun mencakup struktur organisasi, hubungan antara petani, pemerintah dan pihak lain dala sektor pertanian serta pihak lain yang memengaruhi keberlangsungan pertanian. Selanjutnya, tim pengabdian juga menyampaikan manfaat organisasi pekebun, seperti peningkatan daya tawar, akses ke sumber daya, dan pengembangan kapasitas. Pemerintah perlu merumuskan peraturan yang komprehensif untuk mengatur hak dan kewajiban kelompok tani. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani dapat dijadikan acuan yang jelas, karena peraturan tersebut menetapkan hak serta kewajiban yang harus dijalankan dan diterima oleh kelompok tani (Sulistiyawan et al., 2022).



**Gambar 1. Pekebun kelapa sawit swadaya yang mengikuti penyuluhan terkait pentingnya kelembagaan pekebun**

Gambar 1. Memperlihatkan peserta penyuluhan yang merupakan pekebun kelapa sawit swadaya di Desa Koto Tibun antusias mendengarkan penjelasan fasilitator. Fasilitator merupakan tim pengabdian Jurusan Agribisnis Universitas Riau. Fasilitator menjelaskan tentang manfaat kelembagaan, seperti akses yang lebih mudah terhadap informasi, teknologi, pasar serta peningkatan posisi tawar pekebun dalam rantai pasok. Kelembagaan, salah satunya kelompok tani memiliki beberapa peran, sebagai wadah belajar, unit produksi dan unit bisnis (Budiandrian et al., 2022; Elsiana et al, 2018; Riani et al., 2021). Selain itu, antusias peserta juga karena kedatangan Bapak Helvizar dan tim dari Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar. Kedatangan ini sebagai dukungan untuk pembentukan kelompok tani bagi pekebun kelapa sawit swadaya di desa Koto Tibun (Gambar 2). Dengan adanya kelompok tani, maka arus informasi dari pemerintah melalui penyuluh akan lebih mudah (Lagiaduay et al., 2024). Hasil penelitian tentang jaringan komunikasi pada pekebun di Provinsi Riau juga menunjukkan bahwa aktor sentral yang merupakan

pusat informasi adalah ketua kelompok tani dan penyuluh (Rosadi et al., 2020; Yulida et al., 2020). Penelitian lain juga menyimpulkan hal yang sama, yaitu aktor sentral merupakan ketua kelompok tani sehingga memudahkan arus informasi kepada seluruh petani (Achdiyat, 2018).



**Gambar 2. Kegiatan penyuluhan tentang pentingnya kelembagaan dalam persiapan sertifikasi ISPO**

2. Menjelaskan komponen kelembagaan antara lain person (orang) yaitu orang-orang yang terlibat dalam kelembagaan. Orang-orang yang tergabung dalam kelembagaan ini harus dapat diidentifikasi dengan jelas. Selanjutnya orang-orang tersebut diidentifikasi berdasarkan kepentingannya. Kepentingan ini sekaligus sebagai pengikat dalam kelembagaan. Komponen ketiga yaitu aturan, di mana setiap lembaga mengembangkan serangkaian kesepakatan yang disepakati bersama. Selanjutnya dilakukan pelatihan, disini bertujuan membantu pekebun mengimplementasikan praktik pengelolaan kebun yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*). Penerapan GAP memberikan banyak sekali dampak positif bagi petani, antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya alam (Bahar et al., 2019; Sjamsijah et al., 2023). Bahkan penerapan GAP dapat meningkatkan pendapatan pekebun kelapa sawit (Budi et al., 2020), namun masih banyak petani yang tidak mendapatkan akses informasi tentang GAP tersebut (Nasution et al., 2023). Selain itu, kesulitan petani menerapkan GAP juga karena terbatasnya modal, lahan (Trimo & Hidayat, 2024). Selain itu, juga diberikan materi antara lain :
  - a. Membimbing petani dalam pembentukan organisasi pekebun, perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta dalam proses pemilihan pengurus organisasi.
  - b. Memfasilitasi penyusunan rencana pengelolaan kebun yang mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
  - c. Memberikan pelatihan tentang praktik GAP, meliputi pemilihan bibit unggul, teknik penanaman yang efisien, pemberian pupuk yang tepat, pengendalian hama dan penyakit secara efektif, serta proses pemanenan yang optimal.

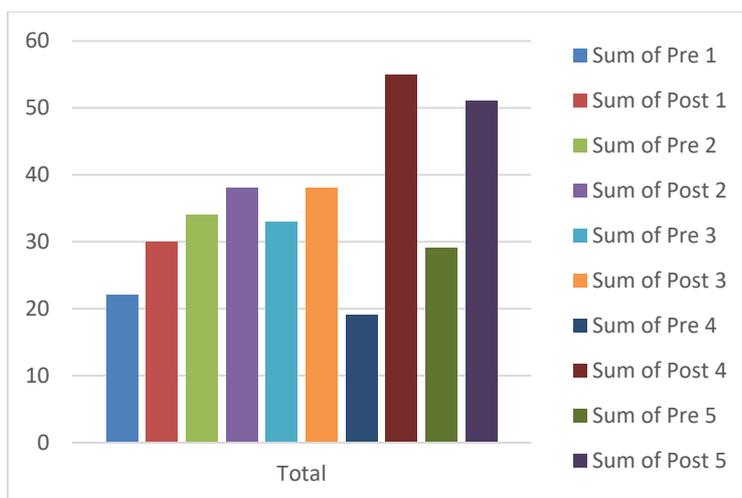
Tahap selanjutnya adalah proses inisiasi pembentukan kelompok tani. Kelompok tani adalah sekelompok individu yang bergerak dalam bidang pertanian, peternakan, atau perkebunan yang dibentuk dengan mempertimbangkan adanya kesamaan tujuan, keadaan sosial ekonomi, serta sumber daya yang tersedia di antara anggotanya. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta memperluas pengembangan usaha yang dijalankan oleh masing-masing anggota (Kementerian Pertanian, 2013). Sebuah kelompok tani harus memiliki pengikat. Hal yang bisa menjadi pengikat adalah kepentingan yang sama, kawasan usaha tani, kader yang berdedikasi, kegiatan yang bermanfaat dan motivasi dari tokoh masyarakat. Dalam hal ini, pekebun kelapa sawit swadaya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahan desa. Kepala desa, melalui sekretaris desa mengatakan bahwa desa akan mendukung pembentukan kelompok tani ini (Gambar 3).



**Gambar 3. Sekretaris desa ikut memberikan motivasi bagi pekebun agar membentuk kelompok tani**

**Pengukuran keberhasilan kegiatan pengabdian**

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kegiatan pengabdian, dilakukan pre dan test pada peserta kegiatan yang merupakan pekebun kelapa sawit swadaya di Desa Koto Tibun (Gambar 4). Pada pre-test, terlihat bahwa peserta memiliki pemahaman yang bervariasi tentang kelembagaan petani kelapa sawit. Sebanyak 28,57% peserta tidak mengetahui apa pun tentang kelembagaan petani kelapa sawit, 21,43% peserta hanya mengetahui nama-nama kelembagaan, 42,86% mengetahui fungsi dan peran kelembagaan, dan hanya 7,14% peserta yang memahami bagaimana kelembagaan bekerja dan berkontribusi terhadap produktivitas.



**Gambar 4. Grafik pengukuran pre dan post test**

Tujuan utama dari pembentukan kelompok tani dalam konteks kelapa sawit adalah untuk berbagi informasi dan sumber daya, seperti yang diketahui oleh 71,43% peserta. Hidayat et al. (2024) mengungkapkan bahwa kontribusi kelompok tani, pengalaman dalam berusaha tani, dan penerapan pupuk yang dilakukan secara bersama-sama berperan penting dalam mempengaruhi hasil produksi kelapa sawit. Sebanyak 21,43% peserta percaya bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah, sementara 7,14% peserta tidak mengetahui tujuannya. Hanya 35,71% peserta yang memahami bahwa kelompok tani dapat mempengaruhi hasil panen kelapa sawit mereka dengan membantu dalam teknik budidaya dan pengelolaan. Sebanyak 42,86% peserta percaya bahwa kelompok tani hanya mempengaruhi secara tidak langsung, 14,29% peserta berpendapat bahwa tidak berpengaruh, dan 7,14% peserta tidak mengetahui dampaknya. Terdapat 57,14% peserta yang belum pernah bergabung dengan kelompok tani

atau asosiasi petani kelapa sawit. Sebanyak 35,71% peserta pernah bergabung tetapi tidak aktif, dan hanya 7,14% peserta yang aktif dalam kelompok tani.

Kendala utama yang dihadapi peserta dalam bergabung atau aktif di kelompok tani adalah kurangnya informasi, yang dinyatakan oleh 50% peserta. Kesulitan dalam komunikasi menjadi kendala bagi 28,57% peserta, masalah finansial bagi 14,29% peserta, dan tidak ada kendala yang dihadapi oleh 7,14% peserta. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terjadi peningkatan yang pesat dalam pengetahuan peserta tentang kelembagaan petani kelapa sawit. Sebanyak 92,86% peserta mengetahui fungsi dan peran kelembagaan, dan 71,43% peserta memahami bagaimana kelembagaan bekerja dan berkontribusi terhadap produktivitas. Hanya 7,14% peserta yang masih hanya mengetahui nama-nama kelembagaan. Sebanyak 85,71% peserta menyadari bahwa tujuan utama pembentukan kelompok tani adalah untuk berbagi informasi dan sumber daya. Sebanyak 14,29% peserta masih percaya bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah.

Pemahaman peserta tentang pengaruh kelompok tani terhadap hasil panen kelapa sawit juga meningkat. Sebanyak 85,71% peserta memahami bahwa kelompok tani dapat membantu dalam teknik budidaya dan pengelolaan. Hanya 14,29% peserta yang percaya bahwa kelompok tani hanya mempengaruhi secara tidak langsung. Terdapat peningkatan dalam partisipasi peserta dalam kelompok tani. Sebanyak 71,43% peserta bergabung dengan kelompok tani setelah mengikuti kegiatan, dan 21,43% peserta menjadi aktif dalam kelompok tani yang sudah ada. Hanya 7,14% peserta yang tetap tidak bergabung dengan kelompok tani. Kendala utama yang dihadapi peserta berkurang secara signifikan setelah mengikuti kegiatan. Hanya 21,43% peserta yang masih mengalami kendala kurangnya informasi. Pekebun menyatakan bahwa informasi pentingnya kelembagaan ini memotivasi mereka untuk membentuk kelembagaan, khususnya kelompok tani.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian Jurusan Agribisnis bertujuan memberikan pembinaan tentang sertifikasi ISPO. Setelah dilakukan sosialisasi prinsip dan kriteria ISPO, pelatihan GAP dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun, dilakukan pengukuran melalui posttest. Dari hasil posttest, didapatkan hasil peningkatan pemahaman peserta tentang kelembagaan petani kelapa sawit, tujuan pembentukan kelompok tani, pengaruh kelompok tani terhadap hasil panen kelapa sawit, dan pentingnya partisipasi dalam kelompok tani. Dari kegiatan penyuluhan, petani akan segera membentuk kelompok tani sebagai bagian dari kelembagaan pekebun untuk persiapan sertifikasi ISPO.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada Fakultas Pertanian Universitas Riau yang sudah mendanai kegiatan pengabdian ini. Terimakasih kepada mitra pengabdian, pekebun kelapa sawit swadaya Desa Koto Tibun, Pemerintah Desa Koto Tibun dan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.

## **PUSTAKA**

- Achdiyat, D. G. (2018). Relationship between Leadership of the Board with the Effectiveness of Farmers Group. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(7), 573–582. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i7/4400>
- Bahar, Y. H., Farhan, D., & Ikhsan, M. (2019). Kajian Evaluasi Penerapan Gap (Good Agriculture Practices) Oleh Petani Di Sentra Produksi Sayuran Lembang (Study For Evaluation Of Gap Implementation By Farmers In Lembang Vegetable Production Center). *Journal of Social Dedication*, 6(1).

- Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Afrizal, Hospes, O., Adriana, R., & Poetry, E. (2022). Anti-Corporate Activism and Collusion: The Contentious Politics of Palm Oil Expansion in Indonesia. *Geoforum*, 131, 39–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.002>
- BPS Provinsi Riau. (2024). *Statistik Kelapa Sawit Provinsi Riau 2022* (Vol. 3).
- Budi, F., Neariti, Y., & Awaliah, R. (2020). Analisis Penerapan Gap ( Good Agricultural Practice ) Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada Pt Duta Reka Mandiri Kabupaten Banyuasin. *Agripita*, 4(2), 43–50.
- Budiandrian, B., Azzahra, F., & Setyadi, A. (2022). Peran Organisasi Petani dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Petani di Indonesia. *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension*, 2(2), 123–134. <https://doi.org/10.35706/agrimanex.v2i2.6477>
- Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, H., Mardianingsih, D. I., Rahmadian, F., Hidayati, H. N., & Roslinawati, A. M. (2019). Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 304. <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.304-315>
- Ditjenbun. (2024). Statistik Perkebunan Jilid I 2022-2024. In *Statistik Perkebunan Jilid I 2022-2024*. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=statistik-perkebunan-jilid-i-2022-2024>
- Elsiana, E., Satmoko, S., Gayatri, S. (2018). Pengaruh Fungsi Kelompok Terhadap Kemandirian Anggota pada Kelompok Tani Padi Organik di Paguyuban Al-Barokah Desa Ketapang, Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 2(2): 111-118. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2018.002.02.4>
- Fahamsyah, E., & Pramudya, E. P. (2017). SISTEM ISPO UNTUK MENJAWAB TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA YANG BERKELANJUTAN. *Masyarakat Indonesia*, 43(1), 65–79.
- Hadi, S., Bakce, D., Muwardi, D., Yusri, J., & Septya, F. (2023). ISPO Certification Acceleration Strategies for Independent Oil Palm Plantations. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 21–42. <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.21-42>
- Hidayat, M.A., Sayekti, A.A.S., Nurjanah, D. (2024). Peran Kelompok Tani Terhadap Peningkatan Hasil Produksi Kelapa Sawit di Desa Pasir Emas. *Agrisintech (Journal of Agribusiness and Agrotechnology)*. 5(1): 18-26. <https://doi.org/10.31938/agrisintech.v5i1.604>
- Hutabarat, S. (2018). Ispo Certification and Indonesian Oil Palm Competitiveness in Global Market: Smallholder Challenges Toward ISPO Certification. *Agro Ekonomi*, 28(2), 170. <https://doi.org/10.22146/jae.27789>
- Hutabarat, S., Slingerland, M., Rietberg, P., & Dries, L. (2018). Costs and benefits of certification of independent oil palm smallholders in Indonesia. *International Food and Agribusiness Management Review*, 21(6), 681–700. <https://doi.org/https://doi.org/10.22434/IFAMR2016.0162>
- Kementerian Pertanian. (2013). PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 82/Permentan/OT.140/8/2013 TENTANG. *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg*, 26(4), 1–37.
- Lagiaduay, J., Pattiselanno, A. E., & Puttileihalat, P. M. (2024). Persepsi Petani terhadap Pembentukan Kelompok Tani di Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pendidikan : Kajian Dan Implementasi*, 6(3), 162–176. <https://journalpedia.com/1/index.php/jpki>

- Liana, L., Siregar, H., Marulitua Sinaga, B., & Budiman Hakim, D. (2023). KENDALA PENERAPAN SERTIFIKASI KEBERLANJUTAN OLEH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN EMPIRIS The Constraints to Implementation of Sustainability Certification by Palm Oil Smallholders in Indonesia: An Empirical Review. *Jurnal Dinamika Pertanian Edisi XXXIX Nomor, 2*(2023), 131–140.
- Nasution, N. A. S., Ismiasih, I., & Dinarti, S. I. (2023). Tingkat Pengetahuan Petani Kelapa Sawit Dalam Penerapan Good Agricultural Practices (GAP): Sebuah Analisis Rating Scale. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 16(1), 41. <https://doi.org/10.19184/jsep.v16i1.37946>
- Purnomo, H., Shantiko, B., Sitorus, S., Gunawan, H., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2017). Fire economy and actor network of forest and land fires in Indonesia. In *Forest Policy and Economics* (Vol. 78, pp. 21–31). <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.01.001>
- Rahutomo, A. B., Karuniasa, M., & Frimawaty, E. (2022). PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN PEKEBUN MELALUI SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DI INDONESIA Smallholders' Land Productivity Improvement through Sustainable Palm Oil Certification in Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 43–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.43-55>
- Riani, R., Zuriani, Z., Zahara, H., & Hafizin, H. (2021). Fungsi Kelompok Tani Pada Usaha Tani Padi Sawah di Gampong Uteun Bunta Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. *Agrifo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 6(1), 23. <https://doi.org/10.29103/ag.v6i1.4941>
- Rodhiah. (2018). Analisis Biaya Dan Manfaat Sertifikasi Ispo Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Pasaman Barat. In *Tesis Magister Ilmu Ekonom i Pertanian*. <http://scholar.unand.ac.id/42785/>
- Rosadi, M. A., Sayamar, E., & Andriani, Y. (2020). Analisis Jaringan Komunikasi Penelitian Kelapa Sawit Swadaya di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kursan Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Agribisnis*, 22(1), 16–29. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/agr/article/view/3458>
- Sjamsijah, N., Rini Kusparwanti, T., & Rosdiana, E. (2023). Penerapan Konsep Good Agriculture Practices (GAP) Untuk Memproduksi Sayur yang Sehat dan Berkualitas di Desa Panduan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. *5th National Conference for Community Service*, 7–12.
- Sulistiyawan, A., Utomo, H. S., & Taufik, M. (2022). Studi Tentang Kesejahteraan Kelompok Tani Kelapa Sawit Di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 640–650. <http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP>
- Trimo, L., & Hidayat, S. (2024). *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis Pengendalian Kualitas Panen Berorientasi Good Agricultural Practices ( GAP ) pada Kelapa Sawit ( Elaeis guineensis Jacq . ) Quality Control of Palm Oil ( Elaeis guineensis Jacq . 10(1), 875–883.*
- Yulida, R., Rosnita, & Andriani, Y. (2020). Analisis Jaringan Komunikasi Petani Karet si Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. *Jurnal Agribisnis*, 22(1), 41–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/agr.v22i1.3389>

**Format Sitasi:** Andriani, Y., Kurnia, D., Yusri, J., Restuhadi, F., Rosnita, Yulida, R., Maharani, E., Muwardi, D., Kusumawaty, Y., Septya, F., Anggraini, E., Nurfitasari, M., Hamidi, M.R. (2025). Penguatan Kelembagaan Pekebun Kelapa Sawit dalam Upaya Sertifikasi ISPO di Desa Koto Tibun Kabupaten Kampar. *Reswara. J. Pengabd. Kpd. Masy.* 6(1): 410-420. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v6i1.5242>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))